

Civil Society Democracy in Indonesia Studies; A Sistematic Literature Review

Studi Demokrasi Masyarakat Sipil di Indonesia; Tinjauan Sistematic Literature Review

Shoffanisa Alifiani*

Universitas Muhammadiyah Malang
shoffanisaalifiani@gmail.com

Salahudin

Universitas Muhammadiyah Malang
salahudinmsi@umm.ac.id

Muhammad Firdaus

Jusuf Kalla School of Government
muhammadfirdaus00000@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the importance of the role of civil society in democracy, recognized as a prerequisite and indicator of democratization. The research method applied in this study is a sistematic literature review using 140 scientific articles sourced from the Scopus database. The article review utilizes the VOSviewer application. The results of this study reveal that democracy is a political sistem that refers to freedom, participation, and competition, with several supporting elements such as active participation of the public in societal, national, and state life; recognition of the rule of law and equality among citizens; civilian and military supremacy; freedom of expression, speech, assembly, organization, religion, belief, and self-determination. The study also shows that democracy is a broad and complex concept, with variations between liberal democracy and sosial democracy. This research contributes to the development of democratization in Indonesia by addressing efforts to reduce sosial inequality entrenched within Indonesia's democracy.

Keywords: *democratizatio, , civil society, indonesian*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya peran *Civil society* dalam demokrasi yang diakui sebagai syarat dan penanda terjadinya demokratisasi. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah *sistematic literature review* yang menggunakan 140 artikel ilmiah bersumber dari *Database Scopus*. Review artikel menggunakan *aplikasi Vosviewer*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang mengacu pada kebebasan, partisipasi, dan kompetisi, dengan beberapa perangkat yang mendukung demokrasi, seperti adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, adanya pengakuan supremasi hukum kesamaan diantara warga negara, supremasi sipil dan militer, kebebasan berekspresi, berbicara, berkumpul, berorganisasi, beragama, berkeyakinan dan kebebasan mengurus nasib sendiri. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa demokrasi adalah konsep yang luas dan kompleksitasnya sendiri, dengan varian antara demokrasi liberal dan demokrasi sosial. Penelitian ini berkontribusi pada perkembangan demokratisasi di Indonesia dalam proses pembenahan untuk mengurangi kesenjangan sosial yang mengakar dalam demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: demokratisasi, masyarakat sipil, indonesia



Pendahuluan

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana keputusan penting dibuat berdasarkan kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh masyarakat.¹ Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Ditengah gelombang kemunduran demokrasi global, masyarakat sipil seringkali menjadi garis pertahanan terakhir terhadap kampanye yang melemahkan hak dan kebebasan liberal. Dalam banyak kasus aktivis masyarakat mampu memitigasi, atau bahkan menahan inisiatif-inisiatif anti demokrasi yang dilancarkan oleh para elit politik yang mempunyai kepentingan tertentu². Akan tetapi studi terbaru dari berbagai negara melihat terdapat potensi pertahanan demokrasi yang tertanam dalam masyarakat sipil di Indonesia, mengingat negara tersebut merupakan negara demokrasi terbesar ke-tiga di dunia.³ Indikasi pelanggaran demokrasi di Indonesia nampak didesain oleh pihak eksekutif memanfaatkan situasi untuk membenarkan tindakan-tindakan yang semakin tidak liberal, hal ini dapat dilihat dari melemahnya pihak oposisi di parlemen.⁴ Selain itu, ketegangan yang meningkat dan bertambahnya kekuasaan eksekutif telah mengurangi sumber daya masyarakat sipil di Indonesia, sehingga mempercepat kemunduran demokrasi di negara ini.⁵ Selain itu perspektif yang dikemukakan oleh Gramsci (1971) yang mendefinisikan masyarakat sipil sebagai kumpulan organisme “*privat*”, berbeda dengan negara yang disebutnya masyarakat politik (*political society*).⁶ Gramsci mendefinisikan negara sebagai masyarakat politik ditambah masyarakat sipil “*the state should be understood not only as the apparatus of Civil Society*” (negara tidak harus dipahami hanya sebagai lembaga pemerintahan, tetapi juga sebagai lembaga masyarakat sipil).⁷

Masyarakat sipil merupakan kelompok sosial yang berada di luar negara yang mempunyai kebebasan, kemandirian, dan partisipasi dalam urusan publik. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, dimana warga negara

¹Vivien A Schmidt, “The Future of Differentiated Integration: A ‘Soft-Core,’ Multi-Clustered Europe of Overlapping Policy Communities,” *Comparative European Politics* 17 (2019): 294–315.

²C Takenaka, “State and Civil Society in East Asia in the Age of Globalization,” in *Globalization and Civil Society in East Asian Space* (Taylor and Francis, 2022), 13–38, <https://doi.org/10.4324/9781003079736-3>.

³M Mietzner, “Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials,” *Democratization* 28, no. 1 (2021): 161–78, <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649>.

⁴Eve Warburton and Edward Aspinall, “Explaining Indonesia’s Democratic Regression,” *Contemporary Southeast Asia* 41, no. 2 (2019): 255–85.

⁵Mietzner, “Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials.”

⁶Fadli Afriandi and Fachriza Ariyadi, “Peranan Masyarakat Sipil dalam Demokrasi,” *Madika: Jurnal Politik Dan Governance* 3, no. 1 (2023): 67–79.

⁷Ali Ikhwan and Sri Budi Eko Wardani, “Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube Di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo,” *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 4, no. 1 (2022): 33–46.

mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memilih pemimpin, dan mengawasi pemerintahan. Negara demokrasi liberal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong persaingan, inovasi dan kebebasan ekonomi. Sistem Demokrasi Liberal juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta lembaga hukum dan kepolisian yang independen dari campur tangan politik dan tekanan eksternal⁸.

Demokrasi masyarakat sipil di Indonesia populer baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis termasuk kurangnya demokrasi, suatu kondisi di mana terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam praktik demokrasi seperti rendahnya partisipasi politik. Salah satu factor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik yaitu sistem politik adalah keseluruhan struktur, institusi, proses, dan sistem politik negara tempat para aktor politik berinteraksi. Sistem politik di Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan antara lain korupsi, nepotisme, oligarki, birokrasi, dan konflik. Hal ini mengurangi kepercayaan dan keterwakilan masyarakat dalam politik, serta mengurangi efektivitas dan akuntabilitas pemerintah dan masyarakat sipil transnasional⁹.

Demokrasi transnasional juga terkait dengan konsep masyarakat sipil transnasional, yang mengoperasionalkan teori dan konsep defisit demokrasi, demokrasi transnasional dan masyarakat sipil transnasional. Ketika negara tidak mampu menciptakan tatanan reformasi normative dan kelembagaan yang diinginkan masyarakat sipil transnasional dipandang sebagai “*third force*” dalam politik dunia. kegiatan transnasional gerakan sosial dan masyarakat sipil memberikan kontribusi penting bagi demokrasi, baik dalam konteks hubungan internasional maupun regional¹⁰.

Peran masyarakat sipil dalam transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia, dengan mempertimbangkan konfigurasi politik yang lebih luas. Seringkali demokrasi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah negara. Semakin banyak literatur yang mempertanyakan bagaimana daerah otoriter subnasional dapat didemokratisasi. Meskipun terdapat wawasan yang menarik, semua jalur yang ada bergantung pada tindakan para elit dan oleh karena itu bersifat *top-down*. Salah satu mekanisme yang dapat diusulkan untuk mendorong jalur *bottom-up* ini adalah mekanisme *atsiri* dimana mekanisme yang mengacu pada pendistribusian

⁸Azra, “Indonesia’s Middle Power Public Diplomacy: Asia and Beyond,” in *Palgrave Macmillan Series in Global Public Diplomacy* (Palgrave Macmillan, 2021), 131–54, https://doi.org/10.1057/9781137532299_7.

⁹D Tomsa, “Electoral Democracy in a Divided Society the 2008 Gubernatorial Election in Maluku, Indonesia,” *South East Asia Research* 17, no. 2 (2021): 229–59, <https://doi.org/10.5367/000000009788745877>.

¹⁰M Khusna Amal, “Revisiting Southeast Asian Civil Islam: Moderate Muslims and Indonesia’s Democracy Paradox,” *Intellectual Discourse* 28, no. 1 (2020): 295–318.

kekuasaan dan keadaan yang memudahkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan peraturan, membentuk pemerintah, dan membentuk pengaruh¹¹ Selain itu, mengenai budaya politik dan pengalaman partisipatif, partisipatif umumnya berkaitan dengan nilai – nilai demokrasi dan pendalaman demokrasi¹². Namun, masih terdapat kesenjangan mengenai cara para aktivis dari berbagai sector masyarakat sipil memikirkan dan memahami demokrasi¹³. Di Amerika latin masa kini, ketidakpuasan sosial yang mendalam terhadap elit dan istitusi politik, secara paradoks, justru menjadi lawan dari stabilitas dan ketahanan demokrasi. Paradoks ini menunjukkan bahwa penelitian ilmiah terhadap demokrasi, setidaknya sebagian, bertentangan dengan pandangan masyarakat mengenai demokrasi¹⁴.

Hingga saat ini, pendekatan sains warga terhadap produksi pengetahuan hanya terbatas pada penelitian ilmiah, diterapkan pada sejumlah pertanyaan terbatas sehingga ilmuwan dan warga negara dapat berkolaborasi dan saling percaya. Baru – baru ini pendekatan ini semakin mendapat perhatian dari berbagai pihak diluar bidang ilmu profesional, termasuk Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), jaringan profesional dan koperasi¹⁵. Masyarakat sipil masih bersifat heterogen di seluruh kawasan, namun meskipun organisasinya lemah dan menghadapi perlawanan, masyarakat sipil masih dapat mendukung upaya-upaya yang efektif, meski tidak menyeluruh dalam membentuk norma dan melawan pelanggaran. Keseimbangan yang ada saat ini tidak hanya mencerminkan eskpektasi yang rendah, namun juga optimisme yang hati-hati terhadap peran masyarakat sipil dalam menuntut dan menjaga hak asasi manusia¹⁶

Adapun Negara kesejahteraan, yang pernah dipandang sebagai lembaga yang memberikan respon terbaik terhadap masyarakat yang membutuhkan, terus-menerus mendapat tekanan, baik dari menyusutnya kapasitas negara maupun dari para pendukung dari neo liberal yang mengedepankan tanggung jawab individu. Namun, meskipun terdapat

¹¹D Tomsa and N Bax, “Democratic Regression and Environmental Politics in Indonesia,” *Asian Studies Review* 47, no. 4 (2023): 740–60, <https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2189690>.

¹²M Shokheh, M Ebrahimi, and K Yusoff, “The Role of Indonesian and Egyptians’ Ngos in Democratisation,” *Geopolitics Quarterly* 17, no. 64 (2021): 289–306.

¹³C Lay, “Political Linkages between CSOs and Parliament in Indonesia: A Case Study of Political Linkages in Drafting the Aceh Governance Law,” *Asian Journal of Political Science* 25, no. 1 (2017): 130–50, <https://doi.org/10.1080/02185377.2017.1297243>.

¹⁴K M P Setiawan and D Tomsa, “Defending a Vulnerable yet Resilient Democracy: Civil Society Activism in Jokowi’s Indonesia,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 42, no. 3 (2023): 350–71, <https://doi.org/10.1177/18681034231209058>.

¹⁵A Vandenberg and N Zuryani, *Security, Democracy, and Society in Bali: Trouble with Protection, Security, Democracy, and Society in Bali: Trouble with Protection* (Faculty of Arts and Education, Deakin University, Geelong, Australia: Springer Singapore, 2020), <https://doi.org/10.1007/978-981-15-5848-1>.

¹⁶A Kadir and L H Zuada, “Village Autonomy and Participatory Democracy in Indonesia: The Problem of Community Participation in Post-Village Autonomy in the Southeast Sulawesi Province,” *Public Policy and Administration* 20, no. 4 (2021): 514–29, <https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-4-12>.

penurunan konsensus pasca perang mengenai efektivitas negara kesejahteraan, kerentanan sosial masih tetap menjadi fokus utama kebijakan publik. Namun, meskipun banyak digunakan dalam wacana politik kontemporer, implikasi logis dan praktis dari kerentanan sosial masih belum jelas¹⁷. Liberalisme belakangan ini menjadi slogan favorit beberapa aktor politik di seluruh dunia. Istilah ini memunculkan pemahaman alternatif mengenai demokrasi, dengan menentang kebutuhan yang melekat pada sistem politik demokratis untuk terikat erat dengan nilai-nilai liberal. Kurangnya ketepatan ini seringkali digunakan untuk meningkatkan dukungan masyarakat dalam mengambil tindakan yang mengarah pada diskriminasi dan menolak atau bahkan melawan pluralism¹⁸.

Ada perbedaan yang jelas dalam dampak yang semakin kuat terhadap liberalisme, yang disebabkan oleh perbedaan konstelasi kekuatan lama dan baru dan apa yang dipertaruhkan secara politik dan ekonomi di setiap arena persaingan, serta pentingnya tekanan public yang diungkapkan secara koheren untuk melakukan reformasi khususnya ketika, negara gagal mengatasi ketidakadilan sosial, model-model yang tidak liberal pun bermunculan, beberapa diantaranya berkedok wacana populis yang tetap melayani kepentingan elit predator dan mengalihkan perhatian dari kesenjangan masyarakat.

Perkembangan tersebut dicermati hingga pemilihan presiden tahun 2019¹⁹ Untuk memahami partisipasi masyarakat dalam masyarakat yang sudah terdata dan kemungkinan terjadinya perubahan sosial, kita harus mengedepankan ketidakadilan sosial dan politik dan memahami bagaimana warga negara dibekukan dari masyarakat dan proses “demokratis” secara umum. Hal ini memerlukan desentralisasi teknologi dalam analisis kami dan mengintrogasi dampak structural ketidakadilan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas, sekaligus mengakui kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan teknologi yang terjadi²⁰ Didominasi oleh tesis “masyarakat sipil pasca-sosialis

¹⁷R Tirtosudarmo and P B R Carey, “Indonesia 2019-2022: The Authoritarian Turn as Leitmotif of President Jokowi’s Second Term,” *Asia Major* 33 (2022): 177–213.

¹⁸O Törnquist et al., “The Downside of Indonesia’s Successful Liberal Democratisation and the Way Ahead. Notes from the Participatory Surveys and Case Studies 2000-2016,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 36, no. 1 (2020): 123–38, <https://doi.org/10.1177/186810341703600105>.

¹⁹R Diprose, D McRae, and V R Hadiz, “Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn,” *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 5 (2019): 691–712, <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922>.

²⁰D Holidin, “THE COMPATIBILITY OF ISLAM AND PANCASILA IN INDONESIA’S DECLINING DEMOCRACY,” *Politics and Religion Journal* 16, no. 2 (2022): 179–202, <https://doi.org/10.54561/prj1602179h>.

yang lemah” Eropa Tengah dan Timur secara umum tidak memberikan inspirasi bagi pakar gerakan sosial.²¹

Teori transisi rezim telah menyoroti pentingnya pemimpin gerakan perlawanan moderat dalam menegosiasikan akhir dari otoritarianisme dan demokrasi multipartai. Sementara itu, konteks spesifik dimana para pemimpin oposisi moderat yang percaya pada manfaat penyelesaian konflik secara damai muncul untuk mendapatkan pengaruh yang cukup untuk mengesampingkan unsur-unsur yang lebih radikal kurang mendapat perhatian dalam transisi ke literatur demokrasi²². Teori transisi rezim merupakan kerangka analisis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana perubahan politik dalam sistem demokratis. Teori ini dikembangkan oleh para ahli seperti Samuel P. Huntington, Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter, dan lain-lain. Salah satu aspek penting dari teori transisi rezim dari otoritarianisme ke demokrasi multipartai. Pemimpin gerakan moderat dalam negosiasi untuk mengakhiri otoritarianisme dan demokrasi multipartai. Pemimpin gerakan moderat adalah orang-orang yang tidak menginginkan perubahan politik yang radikal atau revolusioner, tetapi lebih memilih reformasi atau transisi yang damai, bertahap, dan kompromis.²³

Studi terdahulu mengungkap peran masyarakat sipil dalam demokrasi di Indonesia dengan menyoroti berbagai aspek pentingnya peran *Civil society* dalam memperkuat demokrasi. Sebagaimana pendapat Marcus Mietzner menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sipil tetap kuat, mereka menghadapi tantangan dari elit politik anti-reformasi yang menghambat perubahan, menyebabkan stagnasi demokrasi pasca-reformasi.²⁴ Hal yang sama diungkapkan oleh Larry Diamond²⁵, Warburton dan Edwards²⁶ menyoroti bahwa masyarakat sipil yang kuat adalah elemen esensial untuk konsolidasi demokrasi di negara-negara berkembang, karena mereka menyediakan saluran partisipasi politik dan berfungsi sebagai penjaga terhadap penyalahgunaan kekuasaan sertamemiliki peran yang kompleks dimana tidak semua organisasi mendukung nilai-nilai demokratis dan dapat digunakan untuk mendukung agenda anti-demokratis. Sementara Vedi Hadiz berargumen bahwa gerakan masyarakat sipil di Indonesia tidak selalu mendukung nilai-nilai demokratis, dengan

²¹E Gazali, “Learning by Clicking: An Experiment with Sosial Media Democracy in Indonesia,” *International Communication Gazette* 76, no. 4-5 (2021): 425-39, <https://doi.org/10.1177/1748048514524119>.

²²Shokheh, Ebrahimi, and Yusoff, “The Role of Indonesian and Egyptians’ Ngos in Democratisation.”

²³S Schäfer, “Democratic Decline in Indonesia: The Role of Religious Authorities,” *Pacific Affairs* 92, no. 2 (2019): 235-55, <https://doi.org/10.5509/2019922235>.

²⁴Mietzner, “Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials.”

²⁵Larry Diamond, “Breaking out of the Democratic Slump,” *J. Democracy* 31 (2020): 36.

²⁶Warburton and Aspinall, “Explaining Indonesia’s Democratic Regression.”

populisme Islam yang didukung beberapa kelompok masyarakat sipil membawa agenda yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi²⁷.

Keseluruhan studi tersebut mengakui pentingnya peran masyarakat sipil dalam mendukung dan memperkuat demokrasi serta menekankan pentingnya partisipasi aktif dan modal sosial sebagai elemen penting dalam masyarakat sipil yang kuat, namun perbedaan studi ini pada konteks *setting* sejarah dan geografis yang berbeda di setiap negara, serta beberapa studi terdahulu melihat masyarakat sipil secara positif sebagai penjaga demokrasi, sementara yang lain menunjukkan bahwa masyarakat sipil juga bisa digunakan untuk tujuan anti-demokratis. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* dengan artikel yang bersumber dari *Database Scopus* serta belum banyak yang menggunakan metode review artikel dengan *aplikasi Vosviewer*. Karena itu, penelitian ini fokus pada *review paper* dengan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)*, metode ilmiah yang mempunyai kekuatan dan kelebihan dalam memahami isu-isu riset berdasarkan penelitian terdahulu.²⁸

Fokus kajian penelitian ini mengarah kepada upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu “Bagaimana perkembangan penelitian tentang Demokrasi masyarakat sipil di Indonesia?”. Metode penelitian ini digunakan adalah kualitatif analisis konten dengan pendekatan SLR dan analisis artikel menggunakan Vosviewer. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu khususnya ilmu pemerintahan yang terkait dengan isu – isu demokrasi, dan pada pengembangan kebijakan demokrasi di Indonesia.

Metode Penelitian

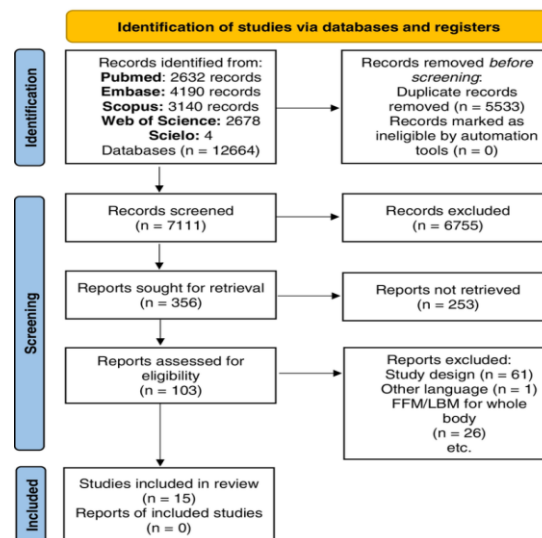
Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah Metode *Systematic Literature Review (SLR)*. Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan bidang topik fenomena yang menarik, dengan pertanyaan penelitian tertentu yang relevan. Dengan menggunakan Metode SLR dapat dilakukan review dan identifikasi jurnal secara sistematis, yang pada setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah atau protokol yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform yang dominan digunakan dalam menyelesaikan pengembangan sistem informasi adalah metode terstruktur.²⁹

²⁷Vedi R Hadiz, “Indonesia’s Missing Left and the Islamisation of Dissent,” in *Marx and Lenin in Africa and Asia* (Routledge, 2021), 151–69.

²⁸Wondimagegn Mengist, Teshome Soromessa, and Gudina Legese, “Method for Conducting Systematic Literature Review and Meta-Analysis for Environmental Science Research,” *MethodsX* 7 (2020): 100777.

²⁹Hayrol Azril Mohamed Shaffril, Samsul Farid Samsuddin, and Asnarulkhadi Abu Samah, “The ABC of Systematic Literature Review: The Basic Methodological Guidance for Beginners,” *Quality & Quantity* 55 (2021): 1319–46.

Peneliti dapat membuat meta-analisis kualitatif dan tinjauan sistematis dengan bantuan metodologi PRISMA (*Preferred Reporting Items for Sistematic Review and Meta-analyses*).³⁰ Secara jelas proses penelitian dengan menggunakan PRISMA diuraikan pada gambar berikut:



Sumber: Johnson and Hennessy³¹

Gambar 1. Diagram Metodologi PRISMA

PRISMA (*Preferred Reporting Items for Sistematic Reviews and Meta-analyses*) adalah sebuah panduan perpustakaan yang memperjelas bagaimana menyampaikan laporan sistem review dan meta-analisis dengan transparansi dan lengkap.³² PRISMA merupakan panduan yang diterbitkan pada tahun 2009 dan telah diperbaharui pada tahun 2020.³³ Tahapan ini dilakukan secara sistematis dan transparan, dengan menggunakan kriteria kelayakan untuk mengidentifikasi dan memilih data yang relevan dan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti, menentukan sumber informasi dengan cara mencari jurnal di *Scopus*, pemilihan Jurnal yang relevan dan sesuai dengan kriteria kelayakan yang telah ditentukan, pengumpulan data yang relevan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti dengan menggunakan metode yang sesuai seperti metasintesis, pengambilan data yang relevan dan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti dengan menggunakan metode metasintesis.³⁴

³⁰Blair T Johnson and Emily A Hennessy, "Systematic Reviews and Meta-Analyses in the Health Sciences: Best Practice Methods for Research Syntheses," *Social Science & Medicine* 233 (2019): 237–51.

³¹Johnson and Hennessy.

³²Robert Prill et al., "Author Guidelines for Conducting Sistematic Reviews and Meta-Analyses," *Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy* 29 (2021): 2739–44.

³³Matthew J Page et al., "The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Sistematic Reviews," *Bmj* 372 (2021).

³⁴Page et al.

Tahapan analisis data pada penelitian ini menggunakan *Vosviewer*, dimana yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data *bibliometric*, yaitu studi kuantitatif literatur yang diterbitkan. Ini melibatkan penggunaan metode statistik untuk menganalisis dan menggambarkan karakteristik dari serangkaian publikasi.³⁵ Menggunakan *Vosviewer* untuk *bibliometric* yaitu dengan cara, mengimpor data bibliografi dari *Scopus*, adapun langkah langkah sebagai berikut;

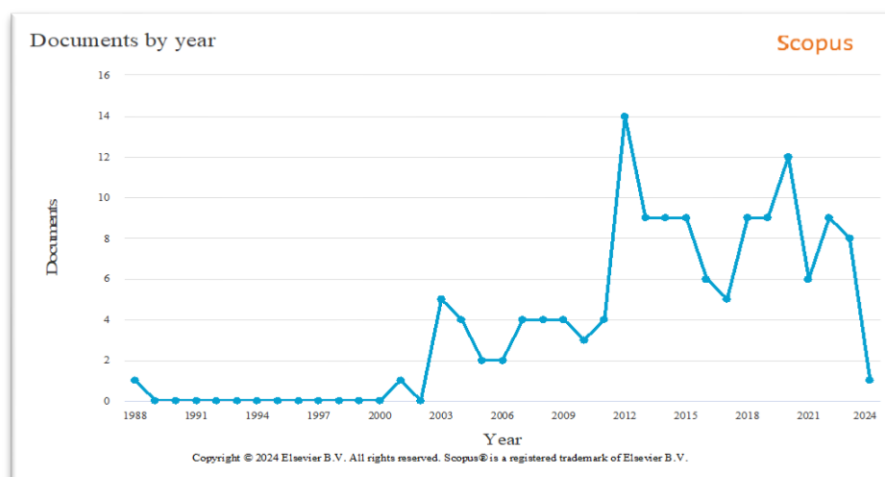


Sumber: erickunto.com³⁶

Gambar 2. Tahapan Visualisasi Data Menggunakan *Vosviewer*

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menunjukkan hasil analisis dari 140 artikel menggunakan database *Scopus*, yang mencakup dinamika berdasarkan tahun terbit, penulis, dan negara. Analisis mapping juga dilakukan dengan menggunakan *VOSviewer*, menghasilkan visualisasi *network* dan *density* untuk mengidentifikasi jaringan yang ada di antara data yang telah dikumpulkan, dengan fokus pada topik-topik yang berkaitan dengan studi terkait Demokrasi *Civil Society* di Indonesia.

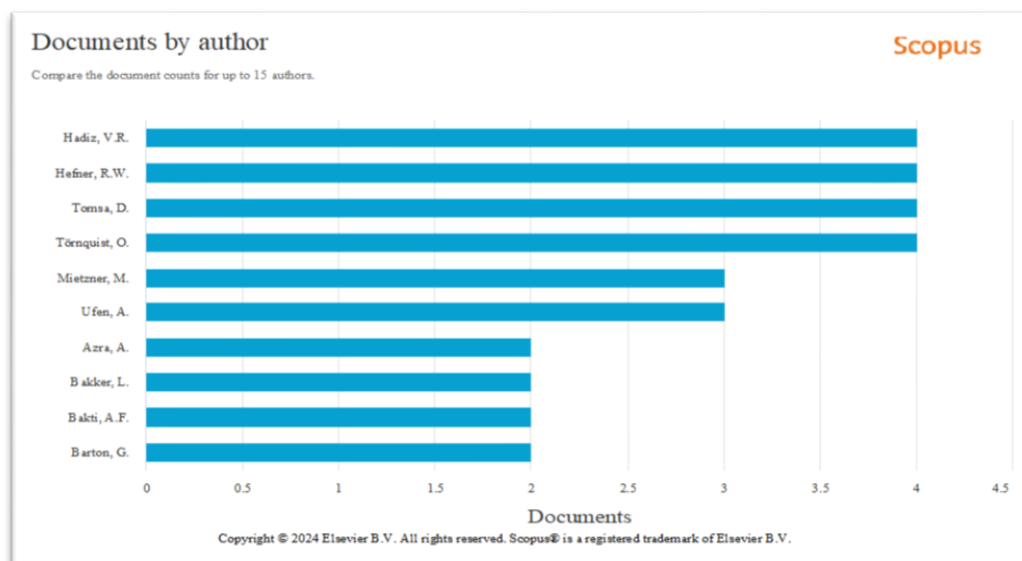


Gambar 3. Data Scopus by Year

³⁵Asep Bayu Dani Nandiyanto and Dwi Fitria Al Husaeni, "A Bibliometric Analysis of Materials Research in Indonesian Journal Using VOSviewer," *Journal of Engineering Research*, 2021.

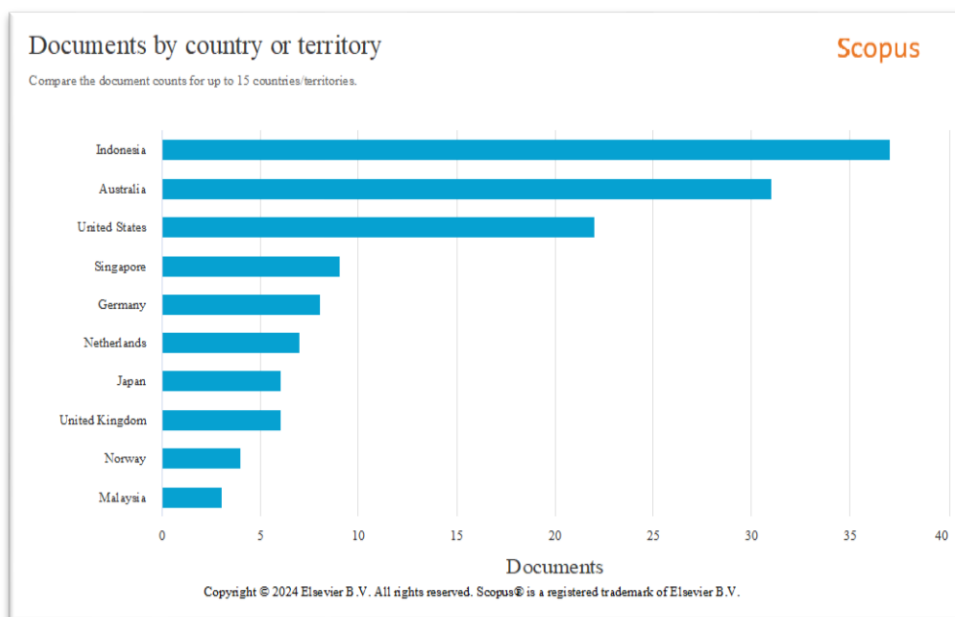
³⁶<https://www.erickunto.com/2021/07/tutorial-membuat-visualisasi-memanfaatkan-vosviewer-online.html>

Grafik ini menunjukkan tren publikasi dari tahun 1998 hingga 2024. Berikut adalah beberapa pengamatan dari data yang disajikan; Pada tahun 1988 peneliti mengalami penurunan dan kestabilan dokumen yang diterbitkan sampai dengan tahun 2000, pada tahun 2003 mulai mengalami peningkatan dari 0 dokumen ke 5 dokumen. Tiga tahun ke depan menuju 2006 dari 5 dokumen menjadi 2 dokumen setelah itu pada 2009 naik menjadi 4 dokumen dan stabil pada tahun 2012. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang pesat menjadi 14 dokumen ke 2018 turun menjadi 5 dokumen. Pada 2019 menjadi 9 dokumen dan turun pada 2021 menjadi 6 dokumen dan pada tahun 2024 turun drastis menjadi 1 dokumen.



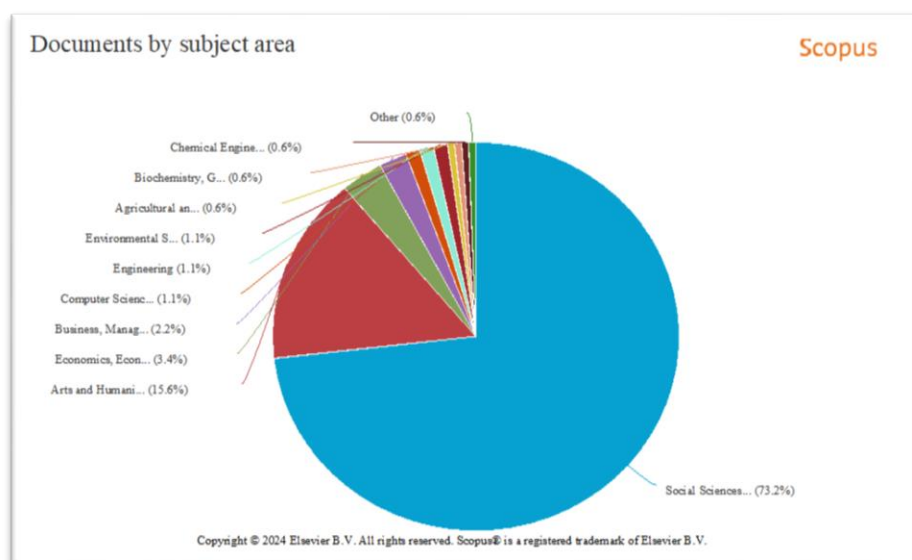
Gambar 4. Data Scopus by Author

Setiap baris pada garis mewakili seorang penulis, dengan nama penulis yang tercantum di sebelah kiri grafik tersebut. Panjang batang horizontal di sebelah kanan menunjukkan jumlah dokumen yang terkait dengan penulis tersebut. Skala sumbu horizontal menunjukkan jumlah dokumen, mulai dari 0 hingga 4 dokumen. Hadiz, V.R., Hefner, R.W., Tomsa, D., Törnquist, O. Selanjutnya, skala sumbu horizontal menunjukkan jumlah dokumen, mulai dari 0 hingga 3 dokumen. Mietzner, M., Ufen, A. Skala sumbu horizontal menunjukkan jumlah dokumen, mulai dari 0 hingga 2 dokumen. Azra, A., Bakker, L., Bakti, A.F., Barton, G.



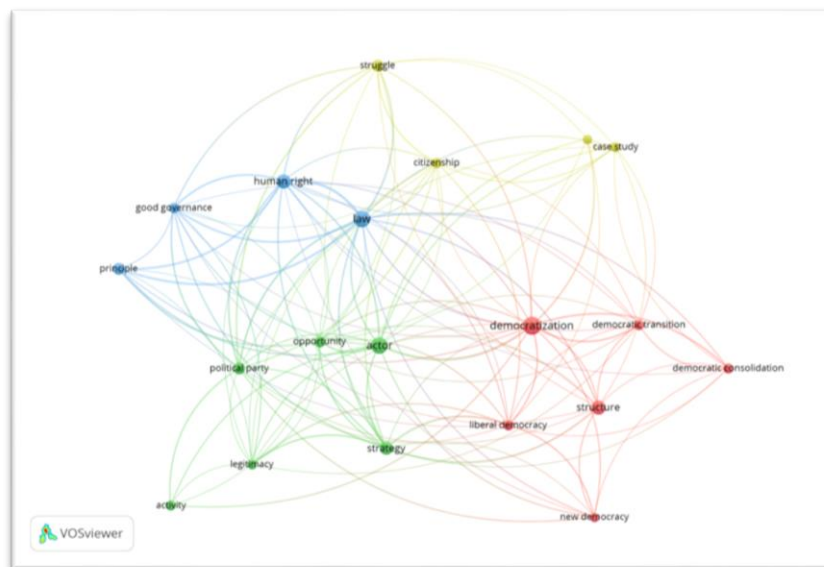
Gambar 5. Data Scopus by Country

Grafik batang horizontal yang menunjukkan jumlah dokumen ilmiah yang dipublikasikan oleh negara atau wilayah, seperti yang tercatat dalam database Scopus. Setiap baris mewakili negara yang berbeda, dengan nama negara tercantum di sebelah kiri. Panjang batang menunjukkan jumlah dokumen yang terkait dengan negara tersebut, dengan skala jumlah dokumen pada sumbu horizontal dari 0 hingga 38 dokumen. Dari grafik ini, kita dapat melihat bahwa Indonesia memiliki jumlah dokumen terbanyak, diikuti oleh negara-negara lain seperti Amerika, United States, Singapore, Germany, Netherlands, Japan, United Kingdom, Norway, dan Malaysia. Grafik ini memberikan gambaran tentang kontribusi relatif setiap negara terhadap literatur ilmiah dalam konteks yang ditentukan oleh data Scopus.



Gambar 6. Data Scopus by Subject Area

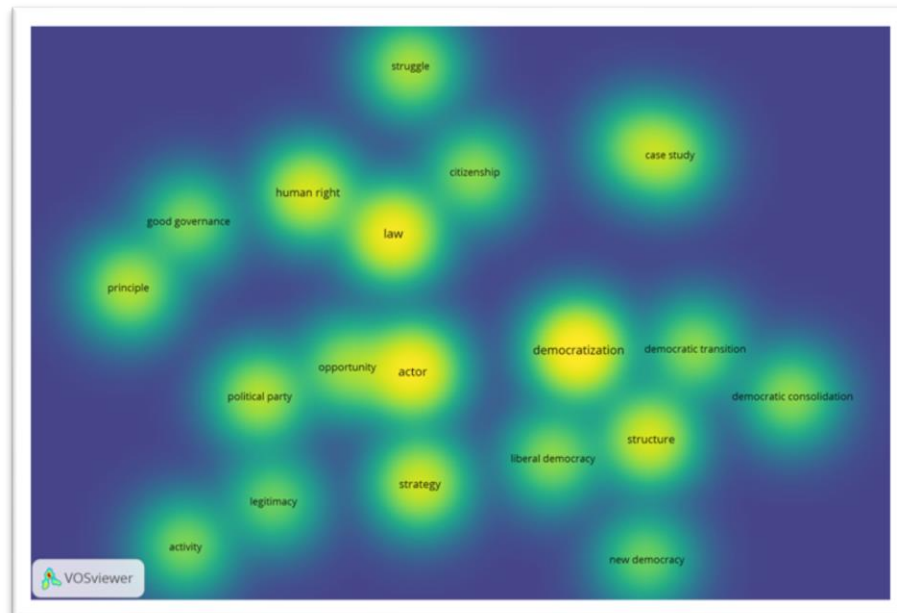
Gambar 6 menggambarkan statistik, yang menunjukkan bahwa minat penulis didominasi oleh area subjek *Sosial Sciences*, yang menyumbang 73,2% dari seluruh area subjek. Ini menunjukkan bagaimana ilmu sosial dan *Civil Society Democracy* in Indonesia tidak dapat dipisahkan karena *Sosial Sciences* tidak dapat mengamati fenomena dan *Civil Society Democracy* tetap di luar lingkup ilmiahnya. Selain itu, banyak peneliti telah berkonsentrasi bahasa studi mereka pada beberapa kata kunci - seperti, Chemical Engine, Biochemistry G, Agricultural an, Environmental S, Engineering, Computer Scienc, Business Manag, Economics Econ, Arts and Humani.



Gambar 7. Visualisasi Peta Perkembangan Penelitian Demokrasi di Indonesia

Mengacu pada visualisasi gambar di atas maka setiap lingkaran mewakili kata kunci yang telah diambil dari setiap judul artikel dan juga abstrak. Besar kecilnya jumlah publikasi ditunjukkan dengan lingkaran. Semakin banyak artikel yang relevan terhadap kata kunci maka semakin besar pula ukuran lingkarannya. Dari hasil visualisasi seperti gambar diatas maka terdapat 4 Klaster terdiri dari 77 artikel. Setiap klaster tersebut dihadirkan dengan warna-warna yang berbeda untuk melihat daftar konsep atau topik yang menonjol dan lebih dominan di setiap klasternya. Data ini tentu saja dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya melalui identifikasi tema yang telah dibahas pada penelitian sebelumnya. Klaster 1 berwarna merah dibagian kanan bawah mencakup berbagai subkelompok yaitu salah satunya demokratisasi adalah sebuah langkah yang dipilih menuju demokrasi, alah satu contohnya adalah rakyat dapat dengan bebas mengemukakan pendapat. Klaster 2 berwarna hijau di bagian kiri bawah mencakup berbagai subkelompok actor, dimana actor memiliki peran penting dalam proses demokrasi di Indonesia dan di bantu dengan adanya partai politik,

klaster 3 berwarna biru bagian kiri atas mencakup berbagai subkelompok yaitu *good governance* untuk untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan klaster 4 berwarna kuning dibagian kanan atas mencangkup berbagai subkelompok yaitu struggle karena saat ini Indonesia mengalami tantangan terbesar demokrasi Indonesia.



Gambar 8. Visualisasi Densitas Demokrasi di Indonesia

Data pada gambar 8 menunjukkan bahwa *democratization* memiliki dampak terbesar pada bagaimana jalannya proses demokrasi masyarakat sipil di berbagai negara terkait akan kritik pemerintah. Karena *democratization* mempunyai peran penting dalam mengembangkan demokrasi maka dari itu, *democratization* ini menjadi pendorong utama dalam keberhasilan demokrasi, hasilnya telah mengembangkan demokrasi masyarakat sipil yang lebih sinergis antara actor dengan strategy. Kemudian, ada *good governance* yang mempunyai peran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini akhirnya menjadi topik percakapan utama penulis. Data dari studi sebelumnya menggunakan sumber *Scopus* akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan apa pun tentang topik yang dibahas, yaitu bagaimana metode demokrasi masyarakat sipil dapat menghasilkan keputusan pemerintah yang berbeda dan menghadapi permasalahan terkait kebijakan pemerintah kepada publik. Bahwa dalam menjalankan demokrasi ini berjalan sejalan *democratization* untuk mendukung agar demokrasi bisa berjalan efektif.

Tren publikasi dalam literatur ilmiah menunjukkan dinamika yang menarik dalam beberapa dekade terakhir, khususnya dari tahun 1998 hingga 2024. Selama periode tersebut, ada fase di mana jumlah publikasi mengalami penurunan dan kestabilan, yakni dari tahun 1988 hingga 2000. Setelah fase tersebut, terjadi lonjakan yang cukup signifikan dalam jumlah

publikasi pada tahun 2003. Namun, tren ini tidak berlangsung terus-menerus, karena pada tahun 2006 terjadi penurunan yang cukup tajam. Pada tahun 2009, ada kebangkitan kembali dalam jumlah publikasi, yang kemudian berhasil dipertahankan hingga tahun 2012. Tahun 2012 menjadi puncak dari tren publikasi selama periode ini dengan mencapai 14 dokumen yang diterbitkan. Sayangnya, tren ini tidak berlangsung lama, karena mulai tahun 2018, jumlah publikasi kembali menunjukkan penurunan yang berlanjut hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi produksi dan publikasi literatur ilmiah dalam periode tersebut, yang mungkin terkait dengan perkembangan dalam bidang penelitian, kebijakan penerbitan, atau perubahan dalam dinamika akademik global.

Hasil analisis dari database *Scopus* menunjukkan bahwa setiap penulis memiliki kontribusi yang berbeda terhadap jumlah dokumen yang berhasil mereka publikasikan. Dari beberapa penulis yang dianalisis, seperti Hadiz, V.R., Hefner, R.W., Tomsa, D., dan Tornquist, mereka memiliki rentang publikasi yang cukup luas, mencapai hingga 4 dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah penulis yang produktif dan aktif dalam meneliti dan mempublikasikan hasil karyanya. Selain itu, penulis lain seperti Mietzner, M. dan Ufen, A. juga menunjukkan produktivitas yang baik dengan rentang publikasi hingga 3 dokumen. Meskipun tidak sebanyak kelompok pertama, namun kontribusi mereka dalam literatur ilmiah tetap cukup signifikan. Sementara itu, ada juga penulis-penulis lain seperti Azra, A., Bakker, L., Bakti, A.F., dan Barton, G. yang memiliki rentang publikasi hingga 2 dokumen.

Kecenderungan Studi Demokrasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Diskusi hasil berdasarkan hasil analisis *scopus*, Indonesia menonjol sebagai negara dengan kontribusi publikasi ilmiah terbanyak. Ini adalah sebuah pencapaian yang signifikan, mengingat Indonesia berhasil mengungguli negara-negara maju dan berpengaruh lainnya di dunia seperti Amerika Serikat, Singapura, Jerman, Belanda, Jepang, Britania Raya, Norwegia, dan Malaysia. Fakta bahwa Indonesia berada di puncak daftar ini menegaskan bahwa negara ini memiliki peran yang sangat penting dalam dunia akademik dan penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang yang diteliti dan dianalisis berdasarkan data *Scopus*. Kontribusi besar Indonesia dalam literatur ilmiah ini dapat diartikan sebagai indikasi dari pertumbuhan dan perkembangan sektor penelitian di negara ini dalam beberapa dekade terakhir dan publikasi ilmiah. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah, institusi penelitian, dan akademisi di Indonesia dalam mengembangkan dan mempromosikan penelitian ilmiah. Selain itu, peran aktif dari komunitas akademik, peneliti, dan penulis di Indonesia dalam mempublikasikan hasil karya mereka secara internasional juga berkontribusi besar terhadap posisi Indonesia

sebagai pemimpin dalam publikasi ilmiah di tingkat global. Secara keseluruhan, hasil analisis ini memberikan gambaran yang sangat positif tentang peran Indonesia dalam kontribusi literatur ilmiah global dan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan dalam dunia penelitian dan publikasi ilmiah internasional.

Selain Indonesia, ilmu sosial mendominasi minat para penulis dengan kontribusi sebesar 73,2% dari total area subjek yang diteliti dan dianalisis. Angka ini menegaskan dominasi dan kepentingan yang tinggi terhadap ilmu sosial sebagai fokus utama dalam literatur ilmiah yang telah dipublikasikan. Kehadiran yang dominan dari ilmu sosial dalam publikasi ilmiah ini mengindikasikan betapa pentingnya bidang ini dalam konteks penelitian di Indonesia, terutama dalam memahami dan mengamati fenomena *Civil Society Democracy*. *Civil Society Democracy* merupakan konsep yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan pemerintahan, dan memahaminya memerlukan pendekatan multidisiplin, yang salah satunya dilakukan melalui ilmu sosial. Dominasi ilmu sosial dalam publikasi ini dapat diartikan sebagai refleksi dari kebutuhan yang mendesak untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasi dinamika masyarakat dan demokrasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa para peneliti dan akademisi di Indonesia sangat memprioritaskan pemahaman terhadap isu-isu sosial, politik, dan budaya yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi dan masyarakat sipil di negara ini.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut dapat dikatakan bahwa *Democratization* memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan proses demokrasi masyarakat sipil dan menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan demokrasi secara keseluruhan.³⁷ Proses demokratisasi ini mencakup serangkaian upaya dan reformasi yang bertujuan untuk memperluas partisipasi politik, meningkatkan transparansi, akuntabilitas pemerintah, serta memperkuat hak asasi manusia dan kebebasan sipil.³⁸

Ketika kita berbicara tentang masyarakat sipil, kita merujuk pada jaringan, organisasi, dan individu di luar pemerintahan yang bekerja bersama untuk mempromosikan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan partisipasi politik.³⁹ Sinergi antara aktor dan strategi dalam masyarakat sipil mencerminkan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan-tujuan demokrasi. Dalam konteks ini, *democratization* berfungsi sebagai

³⁷ Sara Kalm, Lisa Strömbom, and Anders Uhlén, "Civil Society Democratizing Global Governance? Potentials and Limitations of 'Counter-Democracy,'" *Global Society* 33, no. 4 (2019): 499–519.

³⁸Fahdian Rahmandani and Samsuri Samsuri, "Malang Corruption Watch Sebagai Gerakan Masyarakat Sipil Dalam Membangun Budaya Anti-Korupsi Di Daerah," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 21, no. 1 (2019): 49–59.

³⁹Alison Van Rooy, "The Art of Strengthening Civil Society," in *Civil Society and the Aid Industry* (Routledge, 2020), 197–220.

pendorong utama yang memfasilitasi terciptanya sinergi tersebut. Proses demokratisasi yang berhasil akan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk aktor-aktor masyarakat sipil dalam mengembangkan strategi-strategi yang efektif untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Kesimpulan

Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam transisi dari otoritarianisme ke demokrasi, baik selama masa transisi maupun sebagai syarat keberlanjutan demokrasi. Di Indonesia, hubungan antara negara dan masyarakat sipil dipengaruhi oleh konteks lokal, karakter organisasi masyarakat sipil, dan dinamika ekonomi politik. Untuk memperkuat demokrasi, masyarakat sipil harus mampu mengimbangi kekuatan negara, menjembatani kepentingan masyarakat dengan negara, dan mempengaruhi kebijakan untuk kepentingan umum.

Penelitian ini menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam pengembangan demokrasi di Indonesia, terutama dalam mengurangi kesenjangan sosial. Meskipun ada keterbatasan data yang bersumber dari *Scopus*, temuan ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut. Diharapkan dengan kebijakan yang teratur dan pengelolaan aset pemerintahan yang efektif, demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan sumber data dari database internasional bereputasi lainnya seperti *Web of Science* dan *Dimensions Scholars*.

Referensi

- Afriandi, Fadli, and Fachriza Ariyadi. "Peranan Masyarakat Sipil dalam Demokrasi." *Madika: Jurnal Politik Dan Governance* 3, no. 1 (2023): 67–79.
- Azra. "Indonesia's Middle Power Public Diplomacy: Asia and Beyond." In *Palgrave Macmillan Series in Global Public Diplomacy*, 131–54. Palgrave Macmillan, 2021. https://doi.org/10.1057/9781137532299_7.
- Diamond, Larry. "Breaking out of the Democratic Slump." *J. Democracy* 31 (2020): 36.
- Diprose, R, D McRae, and V R Hadiz. "Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn." *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 5 (2019): 691–712. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922>.
- Gazali, E. "Learning by Clicking: An Experiment with Social Media Democracy in Indonesia." *International Communication Gazette* 76, no. 4–5 (2021): 425–39. <https://doi.org/10.1177/1748048514524119>.

- Hadiz, Vedi R. "Indonesia's Missing Left and the Islamisation of Dissent." In *Marx and Lenin in Africa and Asia*, 151–69. Routledge, 2021.
- Holidin, D. "The Compatibility of Islam and Pancasila in Indonesia's Declining Democracy." *Politics and Religion Journal* 16, no. 2 (2022): 179–202. <https://doi.org/10.54561/prj1602179h>.
- Ikhwan, Ali, and Sri Budi Eko Wardani. "Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube Di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 4, no. 1 (2022): 33–46.
- Johnson, Blair T, and Emily A Hennessy. "Systematic Reviews and Meta-Analyses in the Health Sciences: Best Practice Methods for Research Syntheses." *Social Science & Medicine* 233 (2019): 237–51.
- Kadir, A, and L H Zuada. "Village Autonomy and Participatory Democracy in Indonesia: the Problem of Community Participation in Post-Village Autonomy in the Southeast Sulawesi Province." *Public Policy and Administration* 20, no. 4 (2021): 514–29. <https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-4-12>.
- Kalm, Sara, Lisa Strömbom, and Anders Uhlin. "Civil Society Democratising Global Governance? Potentials and Limitations of 'Counter-Democracy.'" *Global Society* 33, no. 4 (2019): 499–519.
- Khusna Amal, M. "Revisiting Southeast Asian Civil Islam: Moderate Muslims and Indonesia's Democracy Paradox." *Intellectual Discourse* 28, no. 1 (2020): 295–318.
- Lay, C. "Political Linkages between CSOs and Parliament in Indonesia: A Case Study of Political Linkages in Drafting the Aceh Governance Law." *Asian Journal of Political Science* 25, no. 1 (2017): 130–50. <https://doi.org/10.1080/02185377.2017.1297243>.
- Mengist, Wondimagegn, Teshome Soromessa, and Gudina Legese. "Method for Conducting Systematic Literature Review and Meta-Analysis for Environmental Science Research." *MethodsX* 7 (2020): 100777.
- Mietzner, M. "Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials." *Democratization* 28, no. 1 (2021): 161–78. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649>.
- Mohamed Shaffril, Hayrol Azril, Samsul Farid Samsuddin, and Asnarulkhadi Abu Samah. "The ABC of Systematic Literature Review: The Basic Methodological Guidance for Beginners." *Quality & Quantity* 55 (2021): 1319–46.
- Nandiyanto, Asep Bayu Dani, and Dwi Fitria Al Husaeni. "A Bibliometric Analysis of Materials Research in Indonesian Journal Using VOSviewer." *Journal of Engineering Research*, 2021.

- Page, Matthew J, Joanne E McKenzie, Patrick M Bossuyt, Isabelle Boutron, Tammy C Hoffmann, Cynthia D Mulrow, Larissa Shamseer, Jennifer M Tetzlaff, Elie A Akl, and Sue E Brennan. "The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews." *Bmj* 372 (2021).
- Prill, Robert, Jon Karlsson, Olufemi R Ayeni, and Roland Becker. "Author Guidelines for Conducting Systematic Reviews and Meta-Analyses." *Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy* 29 (2021): 2739–44.
- Rahmandani, Fahdian, and Samsuri Samsuri. "Malang Corruption Watch Sebagai Gerakan Masyarakat Sipil Dalam Membangun Budaya Anti-Korupsi Di Daerah." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 21, no. 1 (2019): 49–59.
- Rooy, Alison Van. "The Art of Strengthening Civil Society." In *Civil Society and the Aid Industry*, 197–220. Routledge, 2020.
- Schäfer, S. "Democratic Decline in Indonesia: The Role of Religious Authorities." *Pacific Affairs* 92, no. 2 (2019): 235–55. <https://doi.org/10.5509/2019922235>.
- Schmidt, Vivien A. "The Future of Differentiated Integration: A 'Soft-Core,' Multi-Clustered Europe of Overlapping Policy Communities." *Comparative European Politics* 17 (2019): 294–315.
- Setiawan, K M P, and D Tomsa. "Defending a Vulnerable yet Resilient Democracy: Civil Society Activism in Jokowi's Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 42, no. 3 (2023): 350–71. <https://doi.org/10.1177/18681034231209058>.
- Shokheh, M, M Ebrahimi, and K Yusoff. "The Role of Indonesian and Egyptians' Ngos in Democratisation." *Geopolitics Quarterly* 17, no. 64 (2021): 289–306.
- Takenaka, C. "State and Civil Society in East Asia in the Age of Globalization." In *Globalization and Civil Society in East Asian Space*, 13–38. Taylor and Francis, 2022. <https://doi.org/10.4324/9781003079736-3>.
- Tirtosudarmo, R, and P B R Carey. "Indonesia 2019-2022: The Authoritarian Turn as Leitmotif of President Jokowi's Second Term." *Asia Maior* 33 (2022): 177–213.
- Tomsa, D. "Electoral Democracy in a Divided Society the 2008 Gubernatorial Election in Maluku, Indonesia." *South East Asia Research* 17, no. 2 (2021): 229–59. <https://doi.org/10.5367/000000009788745877>.
- Tomsa, D, and N Bax. "Democratic Regression and Environmental Politics in Indonesia." *Asian Studies Review* 47, no. 4 (2023): 740–60. <https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2189690>.
- Törnquist, O, H Hanif, E Hiariej, W P Samadhi, and A Savirani. "The Downside of Indonesia's Successful Liberal Democratisation and the Way Ahead. Notes from the Participatory Surveys and Case Studies 2000-2016." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 36, no. 1 (2020): 123–38. <https://doi.org/10.1177/186810341703600105>.

Vandenberg, A, and N Zuryani. *Security, Democracy, and Society in Bali: Trouble with Protection*. *Security, Democracy, and Society in Bali: Trouble with Protection*. Faculty of Arts and Education, Deakin University, Geelong, Australia: Springer Singapore, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-5848-1>.

Warburton, Eve, and Edward Aspinall. "Explaining Indonesia's Democratic Regression." *Contemporary Southeast Asia* 41, no. 2 (2019): 255–85.